

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan dan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, 2011, Penghitungan Deforestasi Indonesia Periode 2006- 2009, Kementerian Kehutanan : Jakarta
- Dirjen Planologi, 201, Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Direktorat jenderal planologi kehutanan Dan tata lingkungan: Gedung Manggala Wanabakti Blok I lt.7, Jln. Gatot Subroto – Senayan, Jakarta – Indonesia.
- Hamali, Arif Yusuf. 2016. Pemahaman Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: CAPS (*Center for Academic Publishing Service*)
- Hasibuan, Malayu, S.P. 2005. Manajemen Sumberdaya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara, Jakarta)
- Kementrian Kehutanan Nomor SK. 718/Menhut-II/2014 (tentang Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara). Jakarta
- Marwansyah. 2010. Mananajemen Sumber Daya Manusia, Alfabeta, Bandung.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah. Jakarta
- Nawawi, Hadari, 2008, Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Palan, R. 2007. Competency Management, Teknik Mengimplementasikan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi. Jakarta: Penerbit PPM
- Peraturan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor: P.5/VII-WP3H/2012, tanggal 14 Mei 2012, tentang Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).Jakarta
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 101 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Daerah

- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P. 6/Menhut-II/2009 Tentang Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Huta. Jakart
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P. 42/Menhut-II/ 2011. Standar Kompetensi Bidang Teknis Kehutanan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi. Jakarta
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.6/Menhut-II/2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Pengelolaan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (Kphl) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp). Jakarta
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022. Tentang Profesi Dan Kompetensi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan.Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan
- Rizal. dkk. Study of the Implementation Strategy of Forest Management Unit: Case Study in Tana Toraja Regency, South Sulawesi Province, Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan Vol. 8 No. 2, Agustus 2011: 167 – 188. Balai Penelitian Kehutanan Makassar.
- Sulistiyono. N. 2008. Kebutuhan Sumberdaya Manusia (SDM) Menuju Kemandirian KPH, Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 41 tahun 1999 Tentang kehutanan, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Jakarta

Uphoff, Norman. 1986. Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook With Cases. Kumarian Press.